

MANAJEMEN PROGRAM PENDIDIKAN INKLUSI DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN UMUM

Michelle Celsilia Syaharani

**Program Studi Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta, Jl Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat 15412, Indonesia**

michellecelsiliasyaharani@gmail.com

Abstrak

Pelaksanaan pendidikan inklusi merupakan salah satu layanan untuk program pendidikan khusus yang artinya pendidikan ini menerima anak yang memiliki latar belakang khusus untuk mendapatkan pelayanan pendidikan di satu ruang kelas bersama dengan siswa umum atau reguler. Penelitian ini tentu memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan manajemen program pendidikan inklusi, kendala, tantangan dan upaya – upaya apa yang telah dilakukan di salah satu Sekolah Menengah Kejuruan Umum Negeri yang berada di Jakarta barat. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif, sehingga menggunakan beberapa teknik pengumpulan data seperti melakukan observasi wawancara dan terdapat akurasi data dari pihak sekolah tersebut. Subjek dalam penelitian meliputi bagian wakil kurikulum, wali kelas, siswa reguler, guru bk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 24 anak dengan berlatar belakang khusus dengan kebutuhan yang berbeda – beda, kurikulum yang mereka gunakan sama yaitu menggunakan kurikulum 2013, hanya terdapat perbedaan indikator, kendala yang dihadapi yaitu tidak tersedianya tenaga didik khusus untuk membantu perkembangan belajar mereka, tidak ada koordinator yang menangani pendidikan inklusi, kurangnya tenaga guru pendamping serta kurang adanya fasilitas untuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) sehingga biaya yang mereka butuhkan lebih besar. Beberapa orang tua murid juga sering protes kepada guru karena mereka ingin anaknya diperlakukan sama dengan murid reguler sedangkan hal tersebut tentu sangat minim dilakukan, sehingga hal tersebut banyak memicu konflik dalam kegiatan belajar mengajar.

Kata Kunci : *Anak Berkebutuhan Khusus; Manajemen; Pendidikan Inklusi; Sekolah Umum.*

Abstract

The implementation of inclusive education is one of the services for special education programs, which means that this education accepts children who have special backgrounds to receive educational services in one classroom together with general or regular students. This research certainly has the aim of finding out how the management of inclusive education programs is implemented, the obstacles, challenges and efforts that have been made at one of the State General Vocational High Schools in West Jakarta. The research uses a qualitative descriptive method, so it uses several data collection techniques such as conducting interview observations and there is data accuracy from the school. Subjects in the research included curriculum representatives, homeroom teachers, regular students, guidance and counseling

teachers. The results of the research show that there are 24 children with special backgrounds with different needs, the curriculum they use is the same, namely using the 2013 curriculum, there are only differences in indicators, the obstacles faced are the unavailability of special teaching staff to help their learning development, none coordinator who handles inclusive education, lack of accompanying teachers and lack of facilities for Children with Special Needs (ABK) so that the costs they require are greater. Some parents also often protest to teachers because they want their children to be treated the same as regular students, even though this is of course very minimally done, so this triggers a lot of conflict in teaching and learning activities.

Keywords: *Children with Special Needs; Management; Inclusive Education; Public school.*

PENDAHULUAN

Pendidikan hal terpenting bagi setiap manusia supaya dapat menjadi upaya untuk berkembangnya suatu negara. Namun, pendidikan masih memiliki beberapa permasalahan yang sampai saat ini masih dirasakan oleh pendidik maupun siswa yang dididik. Permasalahan tersebut yaitu seperti tingginya angka buta huruf, meningkatnya angka siswa yang putus sekolah, terutama pada anak yang memiliki kebutuhan mental, intelektual dan lain lain yang mengharuskan mereka mendapatkan pelayanan pendidikan khusus dengan baik. Seperti yang terdapat pada Pasal 11 Ayat 1 yang bunyinya “Pemerintahan pusat dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi” dan dilanjutkan dengan Ayat 2 “Pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun”. Artinya peraturan tersebut diperuntukkan bagi semua manusia supaya mereka dijamin untuk berhak memperoleh pendidikan yang unggul serta pelayanan yang baik (Agustin, 2016).

Dan salah satu upaya diberlakukan dari pemerintah yaitu dengan menerapkan pendidikan inklusi di Sekolah Kejuruan Umum. Pendidikan inklusi ini memiliki tujuan yaitu untuk membantu mengembangkan keterampilan dan potensi diri yang dimiliki oleh peserta didik berdasarkan kemampuannya. Pendidikan Inklusi merupakan pendidikan yang tidak menerapkan perbandingan dari keadaan fisik, pengetahuan, sosial, emosi, bahasa atau bahkan kondisi lain termasuk kepada orang yang memiliki keistimewaan khusus. Pendidikan inklusi juga telah mengatur tingkatan anak yang memiliki latar belakang khusus dengan mengelompokkan jenis kebutuhan peserta didik dari mulai tingkat ringan, sedang dan berat sekalipun untuk bergabung di kelas tanpa adanya diskriminasi apapun demi mewujudkan pendidikan yang dapat saling menghargai. Sedangkan seperti yang kita ketahui bahwa Sekolah Kejuruan merupakan sekolah menengah tingkat atas yang memfokuskan anak didiknya untuk mengasah keterampilannya supaya peserta didik kelak siap dapat terjun ke dunia industri nyata. Sekolah kejuruan disini juga menerapkan banyak praktek ketimbang materi untuk mengasah mental mereka menghadapi dunia kerja yang akan mereka alami nantinya. Maka dari itu, di sekolah kejuruan ini siswa non reguler juga akan mendapatkan pelayanan pendidikan yang sama dengan siswa reguler dengan diasah keterampilannya supaya mereka dapat mengetahui keterampilan apa yang mereka miliki. Berikut penjelasan lebih dalam mengenai manajemen pendidikan pada pendidikan inklusi untuk anak berkebutuhan khusus :

a. Manajemen Pendidikan

Manajemen sendiri ialah sebuah aktivitas yang dilakukan dari, oleh dan untuk manusia. Manajemen merupakan suatu hal yang dapat mengendalikan dan memberi manfaat untuk

semua pengaruh dan sumber daya, yang memerlukan strategi rencana (planning), untuk mewujudkan tujuan (Prajudi Atmosudirdjo, 1982 : 124). Sedangkan, Manajemen pendidikan merupakan keseluruhan proses kerjasama dengan memanfaatkan semua sumber anggota dan materil yang ada dan sesuai untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien (Djam'an Satori, 1980: 4). Sehingga, pada intinya manajemen pendidikan merupakan bentuk sebuah penerapan manajemen dalam mengelola, dan mengatur pendidikan yang merupakan sarana untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia. (Sewang, 2015).

b. Anak Berkebutuhan Khusus

Anak keistimewaan khusus tentu memiliki hak yang sama yaitu untuk tetap tubuh dan berkembang seperti anak – anak lainnya di tengah – tengah lingkungan keluarganya, maupun dalam lingkungan masyarakat. Karena setiap orang tidak ada yang minta dilahirkan dengan membawa kebutuhan khusus ataupun menyandang kelainan dan kecacatan lainnya. Anak dengan kebutuhan khusus yaitu mereka yang memerlukan perlakuan khusus karena memiliki gangguan pertumbuhan dan perkembangan ataupun kelainan yang dimiliki. Hal ini tentu berkaitan dengan Disability, maka anak dengan latar belakang khusus ini memiliki keterbatasan pada salah satu ataupun beberapa kemampuan baik fisik seperti : tunanetra, tunarungu, maupun bersifat psikis seperti slow learner, autism, dan lain sebagainya (Desiningrum, 2016).

Telah disampaikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia 2013, mengatakan bahwa anak berkebutuhan khusus adalah: *“Anak yang mengalami keterbatasan atau ke luarbiasaan, baik fisik, mental-intelektual, sosial, maupun emosional, yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan atau perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain yang seusia dengannya”*. Sehingga dalam hal ini, mereka memerlukan perhatian dan penanganan yang khusus supaya dapat menjalankan keberfungsian lagi. Oleh karena itu, pemerintah pun akhirnya mengeluarkan salah satu alternatif yang dikhususkan kepada Anak berkebutuhan khusus ini melalui salah satu program pendidikan inklusif.

c. Pendidikan Inklusi

Awal mulanya, pendidikan inklusi berawal dari negara – negara skandinavia yaitu Denmark, Norwegia, Swedia. Sejalan dengan perkembangan dunia tentang pendidikan inklusif ini, di Indonesia baru menjalankan konvensi nasional dan menghasilkan deklarasi Bandung pada tahun 2004 lalu menyatakan komitmen pendidikan inklusif yang ditunjukkan untuk dapat memperjuangkan hambatan – hambatan yang terjadi ketika belajar. Selanjutnya pada tahun 2005 Indonesia mengadakan pertemuan internasional di Bukittinggi yang membahas tentang perlunya pengembangan pada program pendidikan inklusif sebagai salah satu cara untuk menjamin supaya anak – anak di Indonesia mendapatkan pendidikan dan pemeliharaan yang layak dan berkualitas. Maka dari itu, berdasarkan semua perkembangan di awal tahun 2000, Pemerintah Republik Indonesia mulai mengembangkan strategi pembelajaran pada pendidikan inklusif. Dan program ini merupakan kelanjutan dari program pendidikan terpadu yang pernah dikembangkan pada tahun 1980-an namun hasilnya kurang berkembang, dan Pemerintah Republik Indonesia meluncurkan kembali program pendidikannya pada awal tahun 2000 dengan mengikuti perkembangan dunia menggunakan konsep pendidikan inklusif yang pada akhirnya terus berkembang sampai pada saat ini. (Herawati, 2016)

Pendidikan inklusi adalah salah satu pendidikan yang memberikan wadah bagi peserta didik penyandang disabilitas. Kata Inklusi sendiri merupakan suatu sistem yang dibangun secara bersamaan oleh tiap-tiap warga sekolah, yaitu masyarakat, kepala sekolah, guru, pengurus yayasan, peserta didik, dan wali murid supaya dapat memberi pengertian bahwa

adanya tanggung jawab bersama untuk mendidik seluruh peserta didik dengan sedemikian rupa sehingga mereka dapat mengembangkan potensi diri (Fauzan, 2021).

Pendidikan inklusif dapat dikatakan sebagai cara yang cukup baik untuk menyelesaikan wajib belajar selama 9 tahun bagi anak – anak yang memiliki latar belakang khusus. Selain itu, pendidikan inklusif juga merupakan metode belajar yang cukup efisien karena dapat dikatakan bahwa tidak perlu mendirikan banyak sekolah khusus untuk mereka yang memiliki latar belakang khusus. Di Dalam pendidikan inklusif, peserta didik akan dididik dan diajarkan supaya dapat mengetahui emosionalnya dan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya supaya lebih baik, dan dapat mengembalikan keberfungsian lagi. Namun, dalam hal lain pendidikan inklusi yang diadakan di sekolah umum ini dapat meningkatkan karakter dan akhlak yang baik kepada peserta didik reguler supaya mereka dapat saling menghargai satu dengan yang lain dan menerima anak – anak berkebutuhan khusus sebagai teman satu kelasnya (Smith, 2009). Smith mengatakan bahwa pengajaran yang harus dilakukan pada pendidikan inklusi harus menggunakan metode belajar yang menyenangkan dan tenaga didik juga memiliki rasa penuh kasih sayang, kreatif bagi semua peserta didik.

UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 5 ayat 1 menyebutkan “setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu” dan Ayat 2 berbunyi “warga negara yang memiliki kelainan khusus dengan kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa untuk belajar bersama – sama dengan peserta didik lain pada satuan pendidikan umum maupun kejuruan dengan cara menyediakan sarana, tenaga didik, tenaga kependidikan dan kurikulum disesuaikan dengan kebutuhan individual peserta didik”. Maka dari itu, Tentu hal ini sangat membuat penulis menjadi tertarik untuk mengupas tuntas tentang apakah semua yang tercantum dalam Peraturan diatas sudah terpenuhi? Ataukah masih banyak proses yang harus dijalankan dan diperbaiki?.

Dengan demikian, berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pihak di salah satu Sekolah Umum Kejuruan pada tanggal 13 Oktober 2022 lalu, mereka mengatakan bahwa telah menerima siswa ABK sejak keputusan awal pemerintah bahwa sekolah umum negeri akan menerima siswa dengan memiliki latar belakang kebutuhan khusus. Namun, karena tidak adanya tenaga didik khusus, akhirnya sekolah pun menerapkan cara pembelajaran yang sama dengan siswa reguler hanya saja dengan memberikan komposisi dan indikator yang berbeda kepada anak ABK. Dengan demikian, permasalahan ini tentu saja menarik perhatian saya untuk meneliti lebih dalam terkait dengan pelaksanaan sistem pembelajaran, atau kendala yang ada pada pendidikan inklusi di salah satu Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Jakarta.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif merupakan sebuah pendekatan yang dilakukan dengan mengungkapkan situasi sosial dengan mendeskripsikan berdasarkan fakta yang benar – benar terjadi, disusun oleh kata – kata berdasarkan teknik pengumpulan data dan berdasarkan analisis data yang relevan dari situasi yang benar terjadi secara alamiah (Satori, 2010).

Penelitian dilaksanakan di salah satu Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Jakarta yang lokasinya berada di Sukabumi Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11560. Subjek yang dipilih juga berdasarkan dengan kebutuhan peneliti yaitu meliputi : Wakil kurikulum sekolah, wali kelas yang berhadapan langsung dengan orang tua murid dan siswa ABK dan siswa reguler yang satu ruangan kelas dan berinteraksi dengan siswa ABK. Sebelum melakukan penelitian, peneliti tentu banyak mencari tahu perbedaan penerapan pendidikan inklusi pada sekolah umum lainnya, namun pada akhirnya peneliti lebih memilih pada tingkat kejuruan, hal ini

dikarenakan pada tingkat kejuruan, siswa/i akan diarahkan langsung kepada dunia industri, sehingga sangat menarik untuk dikupas tuntas. Teknik pengumpulan data dan informasi dalam penelitian ini dengan teknik observasi dan wawancara. Dengan menggunakan beberapa pendekatan kepada subjek supaya mendapatkan informasi yang lebih luas, penelitian ini juga lebih menekankan kepada aspek pemahaman terhadap permasalahan atau studi kasus yang terjadi. Setelah data sudah terkumpul kemudian peneliti dapat menganalisis secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan strategi manajemen pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Jakarta

1. Berdasarkan Kurikulum

Menurut hasil wawancara dengan Wakil Kurikulum, dapat diinformasikan bahwa di sekolah ini menggunakan kurikulum 2013 pada semua siswa yang bersekolah di SMK Negeri ini, hanya saja indikator yang diterapkan oleh sekolah untuk siswa ABK dengan siswa reguler tentu pasti berbeda. Seperti contohnya pada siswa reguler ketika mempelajari matematika, target yang ingin dicapai oleh guru matematika adalah supaya siswa reguler dapat memecahkan soal yang diberikan dan dapat memahami pelajaran yang disampaikan oleh guru dengan mendapatkan nilai diatas kkm yang telah ditentukan, namun berbeda dengan siswa ABK pencapaian target ketika belajar matematika tentu hanya sampai pada ketika mereka dapat membedakan seperti apa gambar – gambar bangun datar dan bangun ruang, atau mereka dapat mengelompokkan jenis – jenisnya saja sudah cukup bagus. Kurikulum yang digunakan pada saat ujian juga tidak dibedakan dengan siswa reguler, siswa/i ABK tetap diminta untuk mengikuti ujian tertulis pada saat pelaksanaan UTS/UAS bahkan Ulangan Harian, serta tugas – tugas sekolah dengan tujuan supaya mereka tetap memiliki aktivitas diluar sekolah.

2. Peserta Didik

Siswa/i yang memiliki latar belakang berkebutuhan khusus di Sekolah ini berjumlah 24 yang terdiri dari 10 siswi dan 14 siswa dari kelas yang berbeda. Mereka juga memiliki jenis kebutuhan yang berbeda-beda diantaranya adalah kesulitan belajar, autis, tuna rungu, tuna grahita sedang, tuna daksa sedang, dan slow learner. Adapun sistem penerimaannya adalah dengan menggunakan PPDB Online seperti biasanya, mereka tidak ada seleksi khusus. Namun, di SMK ini hanya menggunakan sistem waktu (siapa cepat dia dapat). Dalam hal ini, peneliti mendapatkan informasi bahwa siswa/i yang memiliki latar belakang khusus pasti memiliki identitas tersendiri dari sekolah – sekolah sebelumnya. Jadi dalam hal ini, sekolah sangat teliti terhadap data – data siswa non reguler dengan cara melakukan pengecekan terlebih dahulu supaya tidak ada kesalahan data dalam menerapkan strategi pembelajaran kepada mereka.

3. Kegiatan Pembelajaran

Berdasarkan hasil observasi dengan pihak sekolah, yaitu kepada wali kelas dan wakil kurikulum secara umum kegiatan belajar mengajar di sekolah ini sama saja, namun ada perbedaan dengan siswa/i ABK. Peserta didik berkebutuhan khusus mengikuti pembelajaran di kelas dengan cara yang fleksibel/menyesuaikan kondisi dari peserta didik itu sendiri. Jika peserta didik berkebutuhan khusus kondisinya stabil, maka mereka dapat mengikuti pembelajaran di kelas bersama dengan peserta didik reguler. Guru kelas memberikan perhatian khusus kepada peserta didik non reguler. Begitu pun dengan peserta didik reguler, mereka juga kerap memberikan perhatian kepada peserta didik non reguler. Seperti ketika mereka sedang belajar bersama di kelas, peserta didik reguler tidak ada yang merasa terganggu ketika kegiatan belajar dan mengajar sedang berlangsung. Begitupun ketika ada belajar kelompok, mereka menerima peserta didik non reguler untuk masuk ke dalam kelompok mereka dengan cara membangun relasi dengan orang tua/wali murid non reguler. Di sini sekolah juga menerapkan

satu strategi untuk mencegah bahaya – bahaya yang akan terjadi dengan cara menempatkan semua kelas peserta didik non reguler di lantai dasar, untuk mencegah sesuatu hal yang tidak diinginkan.

4. Hubungan Sekolah dengan Masyarakat

Menurut hasil pengamatan, keterkaitan antar sekolah dengan wali murid memiliki hubungan yang sangat tinggi. Mereka mengadakan pertemuan dengan wali murid setiap minggu untuk membicarakan perkembangan peserta didik non reguler. Karena sekolah ini mengarah kepada dunia industri, peserta didik non reguler diwajibkan juga untuk mengikuti kegiatan program sekolah yaitu salah satunya adalah Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang dilakukan ketika peserta didik berada di kelas 11 sesuai dengan jurusan mereka masing – masing. Namun, karena kondisinya tidak memungkinkan sekolah memutuskan supaya mereka praktik di sekolah sesuai dengan jurusan mereka, sedangkan terdapat 4 jurusan di sekolah kejuruan ini yaitu seperti contohnya *yang pertama* untuk jurusan Perkantoran, mereka menjaga perpustakaan dengan melakukan sirkulasi yang dibimbing oleh pembimbing khusus perpustakaan di sekolah, *yang kedua* untuk jurusan Multimedia biasanya mereka ditempatkan di percetakan sekolah dengan melayani jasa untuk mengeprint tugas peserta didik atau mencetak stiker dan lain sebagainya, *yang ketiga* untuk jurusan Pemasaran biasanya mereka ditempatkan di kantin/gerai sekolah untuk berjualan atau di business center (seperti toko swalayan mini) untuk menjadi kasir atau melakukan penataan display barang yang dibimbing oleh pembimbing yang ada, dan *yang keempat* untuk jurusan akuntansi, biasanya mereka ditempatkan di bank mini sekolah untuk melakukan transaksi menabung untuk warga sekolah.

Dengan adanya praktik ini, diharapkan peserta didik dapat berkembang dan memiliki interaksi yang baik dengan masyarakat di lingkungan sekitarnya. Walaupun mereka tidak dapat mengikuti kegiatan di luar sekolah, namun mereka tetap disediakan tempat untuk melatih skill yang dimiliki oleh mereka di dalam sekolah dengan mengikuti beberapa praktik yang sekolah telah terapkan. Maka dari itu, hubungan antara orang tua murid dan guru di sekolah disini tentu memiliki peranan yang sangat besar kepada peserta didik non reguler, supaya mereka tetap dapat mendapatkan pendidikan yang sama dengan peserta didik lainnya.

Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Pendidikan Khusus Di Sekolah Kejuruan Umum :

1. Tidak Tersedianya Tenaga Didik/Pengajar Khusus

Sekolah tidak memiliki tenaga didik khusus untuk membimbing siswa non reguler, maka dari itu tenaga didik membangun relasi dengan orang tua/wali murid ABK untuk menjalankan perannya di sekolah sebagai guru. Mereka sering melakukan konseling kepada orang tua siswa/i ABK untuk memantau perkembangannya. Tentu karena bukan tenaga didik khusus, guru sangat memerlukan bantuan orang tua/wali murid. karena Siswa/i ABK yang memiliki level kebutuhan tinggi perlu mendapatkan pendampingan khusus dari orang tua/wali murid mereka masing – masing. Seperti yang nampak kemarin terdapat salah satu orang tua yang menunggu anaknya di depan kelas, dengan tujuan untuk mencegah hal – hal yang tidak diinginkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan wali kelas, masih banyak wali murid peserta didik non reguler yang tidak mendampingi anaknya lalu mereka melakukan protes kepada guru, yang nyatanya wali murid tersebut tidak mengetahui situasi yang sebenarnya terjadi di sekolah, maka tak jarang dari peserta didik non reguler mengadakan ke orang tuanya karena dirinya diperlakukan berbeda dan sering merasa tersinggung ketika sedang mengajar di dalam kelas. Maka dari itu, pihak sekolah pun akhirnya membuat kebijakan untuk mengadakan konseling kepada orang tua murid non reguler, supaya mereka dapat saling memahami kondisi yang terjadi, tanpa harus menggunakan emosi.

2. Tidak adanya koordinator untuk pendidikan inklusi di sekolah kejuruan umum

Berdasarkan hasil observasi, wakil kurikulum mengatakan bahwa selain tidak adanya tenaga didik khusus, mereka juga tidak memiliki koordinator yang bertanggung jawab terhadap berjalannya pendidikan khusus di sekolah. Oleh karena itu, semua tanggung jawab dilimpahkan kepada para jajaran wakil kurikulum, kesiswaan dan guru-guru untuk mengatur jalannya kegiatan belajar mengajar untuk peserta didik non reguler. Wakil kurikulum dan guru kelas pun mengatakan bahwa sebenarnya kegiatan belajar mengajar pada pendidikan inklusi ini kurang efektif karena tidak ada tenaga didik khusus, sehingga mereka hanya dapat melakukan kegiatan belajar kepada peserta didik non reguler berdasarkan dari apa yang mereka tahu saja.

3. Kurangnya Fasilitas yang memadai

Fasilitas yang tersedia di sini tidak lengkap untuk anak yang memiliki latar belakang khusus. Sarana dan prasarana yang ada di sekolah kurang menunjang peserta didik non reguler untuk melakukan banyak kegiatan. Namun, wali murid cenderung mengambil inisiatif untuk menyediakan perlengkapan anaknya masing – masing sesuai dengan kebutuhan yang ada. Tetapi berdasarkan hasil observasi dengan kurikulum, sekolah dapat mengajukan sarana dan prasarana peserta didik non reguler dengan cara membuat surat pengajuan kepada relasi – relasi lainnya, contohnya seperti ketika ada peserta didik yang tidak memiliki alat bantu dengar, sekolah dapat memberikan rujukan ke puskesmas supaya mendapatkan bantuan dari pemerintah sebagai penunjang sekolah mereka.

KESIMPULAN

Hasil penelitian telah menunjukkan bahwa adanya pendidikan inklusi merupakan salah satu program pemerintah yang cukup baik guna meningkatkan keberfungsian peserta didik yang memiliki keterbelakangan khusus untuk dapat berinteraksi dengan lingkungan yang ada di sekitar mereka. Sesuai dengan tujuannya, semoga dengan adanya pendidikan inklusi dapat memberikan manfaat yaitu dengan memberikan kontribusi yang besar kepada anak yang memiliki kebutuhan khusus dalam bidang pendidikan, jadi semua anak yang memiliki latar belakang khusus mendapatkan hak sama untuk menempuh pendidikannya. Manajemen program pendidikan di Sekolah Kejuruan ini memiliki sistem pembelajaran yang bersifat fleksibel berdasarkan jenis kebutuhan dan kondisi masing – masing peserta didik.

Menurut hasil observasi, Wakil Kurikulum beserta guru kelas, Pendidikan inklusi di sekolah kejuruan ini menjadi kurang efektif dikarenakan tidak adanya tenaga didik khusus dan koordinator pendidikan inklusi sehingga strategi manajemen pendidikan yang dilakukan tentu menjadi kurang maksimal. Oleh sebab itu, dikarenakan pendidikan inklusi di sekolah Kejuruan Umum masih kurang maksimal.

Maka seharusnya Pemerintah menyediakan tenaga didik khusus pada setiap sekolah umum dan memberikan seorang pemimpin yang menjadi koordinator supaya dapat bertanggung jawab untuk terus mengembangkan strategi pembelajaran terkhusus kepada pendidikan inklusi. Karena dengan adanya tenaga didik khusus tersebut, guru – guru reguler tentu dapat berkonsultasi dengan tenaga didik khusus supaya mereka dapat bekerja sama dalam mendidik peserta didik non reguler. Orang tua peserta didik pun harus diberikan konseling khusus supaya mereka dapat memahami situasi dan kondisi yang terjadi kepada anak – anaknya, sehingga perkembangan pendidikan inklusi di Sekolah Kejuruan Umum ini dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, I. (2016). MANAJEMEN PENDIDIKAN INKLUSI. *Education and Human Development Journal*, Vol. 01. No. 01 .
- Desiningrum, D. R. (2016). *Psikologi Anak Berkebutuhan Khusus*. Yogyakarta: Psikosain.
- Fauzan, H. N. (2021). SEJARAH PENDIDIKAN ANAK BERKEBUTUHAN. *Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial*, Volume 3, Nomor 3, hal : 496-505.
- Herawati. (2016). Pendidikan Inklusif. *Jurnal pendidikan Dasar Kampus*, Vol 2 No 1.
- Satori, D. (2010). *Metodologi Penelitian* . Bandung: Alfabeta.
- Sewang, D. H. (2015). *Manajemen Pendidikan*. Malang: Wineka Media.
- Smith, J. (2009). *Konsep dan Penerapan Pembelajaran Sekolah Inklusi* . Bandung: Nuansa.